



DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



DEKLARASI KEMERDEKAAN PERS



DEWANPERS

Susunan Redaksi Buletin Etika:

Dewan Pengarah

Ketua:

Ninik Rahayu

Anggota Dewan Pers:

M Agung Dharmajaya,
Yadi Hendriana,
Arif Zulkifli,
Totok Suryanto,
Paulus Tri Agung Kristanto,
Asep Setiawan

Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

**Penanggung Jawab/
Pemimpin Redaksi:**

M Agung Dharmajaya

Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

Redaksi:

Reynaldo Adair

Sekretariat Dewan Pers:

Wawan Agus Prasetyo,
Reza Andreas,
Elly Savitri Damayanthi,
Watini

Desain & Ilustrasi:

Iwhan Gimbal,
Yudhis

Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers,
Jl. Kebon Sirih No.32-34,
Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10110
Telp: 021-3521488, 021-3504877,
021-3504874, 021-3504875

Media Sosial:

Facebook: Dewan Pers

Twitter: @dewanpers

Instagram: @officialdewanpers

Youtube: Dewan Pers Official

Website: www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF
dapat diunduh dari website
secara gratis.



04. LAPORAN **UTAMA**

**Janji Capres
Tentang
Kemerdekaan
Pers**

03. **Kabar
Kebon
Sirih**

15. **Teropong**

18. **Lintas
Berita**

23. **Grafik**

24. **Galeri**



12. **Opini**

Oleh: Ninik Rahayu

KOMITMEN CAPRES PADA KEMERDEKAAN PERS

Indonesia baru saja menyelenggarakan peristiwa demokrasi, pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden (pilpres) langsung pada 14 Februari 2024 lalu. Prabowo-Gibran adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang -dari hitungan sementara-- memperoleh suara terbanyak sekitar 58%, sedangkan pasangan Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfid MD jauh di bawah. Dengan perolehan suara yang melebihi 51% maka pemilu kali ini — kalau tidak ada protes — berlangsung satu putaran.

Siapa pun yang nanti dilantik, pasangan capres-wapres sangat penting memiliki komitmen kepada kemerdekaan pers. Dewan Pers sebagai lembaga yang mengembang amanah untuk memastikan pelaksanaan kemerdekaan pers berjalan dengan koridor yang benar, berkepentingan untuk mengetahui komitmen capres-wapres. Ini agar pelaksanaan demokrasi berjalan dengan baik.

Mengapa demikian, karena semua sepakat memilih system demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu pilarnya adalah pers, yang menduduki posisi keempat dalam sistem demokrasi. Uurutannya adalah lembaga eksekutif (presiden/pemerintah), legislatif (parlemen), dan yudikatif (pengawas/lembaga penegak hukum), pers (kontrol sosial).

Berdasar amanah Undang-Undang 40/1999 tentang Pers, pada bagian menimbang, ditegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Hal itu representasi dari pelaksana pemerintahan yang menjalankan amanat rakyat di bawah kepemimpinan presiden. Oleh karena itu, Dewan Pers perlu memastikan bahwa pasangan capres-cawapres memiliki komitmen pada kemerdekaan pers.

Berkaitan dengan itu, sebelum pelaksanaan pilpres dan pemilu, Dewan Pers melaksanakan deklarasi kemerdekaan pers. Ini berbeda dengan acara-acara lain di berbagai platform, konstituen, organisasi, yang mengundang capres-cawapres untuk melakukan debat atau paparan visi-misi.

Deklarasi kemerdekaan pers itu berisi tiga poin. Pertama, menjamin independensi dan kemerdekaan pers dari campur tangan pihak mana pun. Kedua, menolak segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap insan pers. Ketiga, mendukung pers profesional agar mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.

Dari tiga capres-cawapres, calon dari nomor 01 Anies Baswedan hadir langsung di acara yang diselenggarakan di Hall Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta. Anies hadir setelah pada pagi harinya melakukan penutupan masa kampanye di Stadion Jakarta Internasional Stadium (JIS), Sunter.

Ganjar hadir melalui aplikasi zoom karena pada saat itu, tanggal 10 Februari, adalah hari terakhir kampanye. Pasangan nomor 03 menutup kampanye di Semarang, Jawa Tengah.

Pasangan capres Prabowo-Gibran tidak bisa hadir karena alasan capai setelah habis-habisan kampanye plus joget di Gelora Bung Karno Jakarta sampai dengan pukul 17.00 WIB. Pasangan Prabowo mengutus Rosan Roeslani, ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju untuk menyampaikan komitmen timnya pada kemerdekaan pers.

Sebagai peristiwa yang pertama kali digelar Dewan Pers, ini merupakan momentum penting, bahwa komitmen kemerdekaan pers harus dimulai dari puncak pemimpin bangsa. Bila tidak, maka pers bisa terancam eksistensinya dalam melaksanakan peran sebagai kontrol sosial, termasuk kontrol pada kebijakan pemerintahan di semua lapisan.

Soal deklarasi kemerdekaan pers itulah yang menjadi laporan utama Etika edisi kali ini. Etika melihat deklarasi sebagai satu bagian dari kewajiban capres-cawapres yang harus dilaksanakan bila pemerintahan baru mulai bergerak.

Di edisi kali ini, pembaca bisa mendapatkan informasi mengenai ide deklarasi dan kekuatan moral yang ada di balik deklarasi. Sebab dengan demikian, insan pers seperti mendapat angin segar rasa aman dalam rangka menjalankan amanah kegiatan jurnalistik. Jadi, amanah menjaga kemerdekaan pers, amanah melaksanakan kontrol sosial termasuk pada pemerintahan melalui karya jurnalistik, adalah sah yang dilindungi/diatur oleh Undang-Undang 40/1999, dan perlu diperjuangkan bersama-sama.

Tim Etika dengan semangat mengangkat peristiwa tersebut, selain karena kegiatan pertama kali (langka), juga secara substansial deklarasi itu memberikan makna luas bagi kehidupan pers ke depan, siapa pun presidennya. Temukan pula galeri foto kegiatan capres juga opini dari ketua Dewan Pers. Selamat membaca. ●

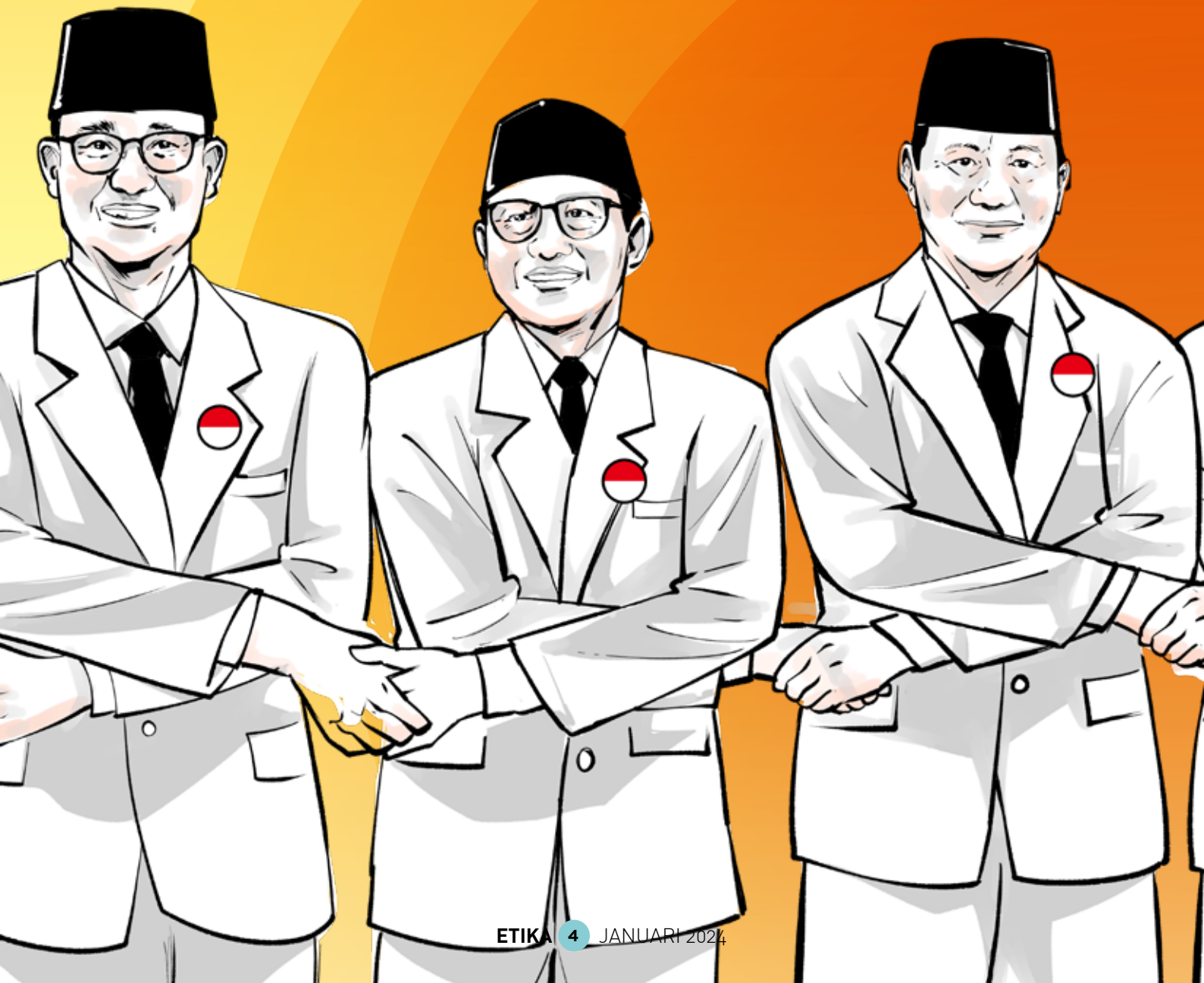


Vol 50 - Februari 2024

Atmaji Sapta Anggoro

Wakil Pemimpin Redaksi

Janji Capres Tentang Kemerdekaan Pers





Seorang rekan wartawan sempat mengutarakan keheranannya tatkala mendengar akan ada deklarasi para calon presiden dan calon wakil presiden di Gedung Dewan Pers. Wartawan itu mempertanyakan

urgensi deklarasi tersebut lantaran pelaksanaan pencoblosan pemilihan presiden-wakil presiden tinggal beberapa hari.

Sang wartawan itu barulah memahami dan bisa menerima ketika dijelaskan, bahwa itu bukan deklarasi capres-cawapres dalam kaitan dengan kampanye pemilu. Akan tetapi, deklarasi itu dimaksudkan dalam rangka meminta komitmen mereka untuk menjaga kemerdekaan pers jika nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Pada tanggal 10 Februari 2024 itu Dewan Pers memang punya hajat besar. Untuk kali pertama sejak berdiri pada 1966 dan era reformasi pada 1998, Dewan Pers menggelar acara Deklarasi Kemerdekaan Pers Capres-Cawapres 2024. Acara semacam itu sebelumnya memang tidak pernah digelar oleh Dewan Pers. Dengan demikian, ini merupakan torehan sejarah baru bagi Dewan Pers.

Deklarasi kemerdekaan pers itu berisi tiga poin. Pertama, menjamin independensi dan kemerdekaan pers dari campur tangan pihak mana pun. Kedua, menolak segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap insan pers. Ketiga, mendukung pers profesional agar mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.



Anggota Dewan Pers yang menjadi ketua panitia deklarasi, Totok Suryanto, mengutarakan ide menggelar deklarasi ini sudah terpikirkan beberapa bulan sebelumnya. Namun Dewan Pers sengaja mencari momentum yang tepat soal tanggal pelaksanaannya. Kemudian dipilihlah tanggal 10 Februari, tepat sehari menjelang pekan atau minggu tenang. Para capres pun hanya dimintai komentar berkaitan dengan kemerdekaan pers dan tidak berkampanye lagi dalam acara tersebut.

“Ini memang bukan ajang kampanye untuk para capres dan cawapres. Kampanye putaran terakhir sudah ditutup oleh pasangan capres-cawapres pada 10 Februari 2024 di sore hari. Itu sebabnya kami sengaja membatasi agar acara deklarasi kemerdekaan pers itu bukan menjadi ajang kampanye,” kata Totok juga menjabat ketua Komisi Kermitraan dan Luar Negeri Dewan Pers.

Bagi Totok, jaminan dari pemimpin negara terhadap kemerdekaan pers merupakan hal yang penting. Dengan jaminan kemerdekaan pers itu maka akan memungkinkan terciptanya independensi pers dan ekosistem yang menunjang para wartawan untuk menghasilkan karya jurnalistik berkualitas.

“Satu di antara tiga pasang capres-cawapres ini akan menjadi pemimpin kita di masa depan. Penting bagi kita untuk meminta jaminan, bahwa siapa pun yang terpilih menjadi presiden nanti, maka kemerdekaan pers itu adalah sesuatu yang perlu dijunjung tinggi,” kata dia.

Ia menjelaskan pers selalu memiliki tugas untuk mengkritisi pemerintah apabila terjadi dugaan penyimpangan.



Siapa pun yang terpilih menjadi presiden nanti, maka kemerdekaan pers itu adalah sesuatu yang perlu dijunjung tinggi.”

Totok Suryanto



Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto memberikan pernyataan usai Deklarasi Kemerdekaan Pers Capres dan Cawapres pada Sabtu (10/2/2024) di Hall Dewan Pers, Jakarta.
(FOTO: DEWAN PERS)



▲ Dewan Pers menggelar jumpa pers terkait rencana kegiatan Deklarasi Kemerdekaan Pers Capres dan Cawapres pada Rabu (31/1/2024) di Hall Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Untuk bisa bersikap kritis, maka perlu ada kemerdekaan pers. Dalam menyampaikan berita, pers harus terhindar dari rasa takut atau intimidasi yang dilakukan oleh pihak mana pun.

“Tugas pers itu menjadi *watch dog* atau anjing penjaga. Ini merupakan salah satu tugas pers untuk melakukan kontrol sosial. Karena itu, apabila ada sesuatu yang tidak bisa dipenuhi atau dijalankan pemerintah, maka kami akan berteriak. Pers itu akan selalu menjadi mitra kritis bagi pemerintah siapa pun yang berkuasa,” ujarnya.

Tatkala acara deklarasi kemerdekaan pers digelar pada malam hari, Anies Rasyid Baswedan (pasangan nomor urut 01) menjadi satu-satunya capres yang hadir secara langsung, tanpa didampingi oleh pasangan cawapres Abdul Muhaimin Iskandar. Anies juga menandatangani secara langsung komitmen deklarasi tersebut.

Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir. Mereka diwakili oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Rosan Perkasa Roeslani.

Sedangkan pasangan calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo hadir melalui aplikasi zoom karena pada sore hari masih harus berkampanye di Solo dan Semarang. Sementara cawapres Mohamad Mahfud Md tidak bisa hadir

lantaran pada malam itu juga harus menuju Arab Saudi untuk menjalankan ibadah umroh.

Ketika memberi sambutan, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyatakan saat ini Indonesia memasuki masa 26 tahun pascareformasi. Peristiwa reformasi merupakan tonggak bagi negara Indonesia untuk hadir sebagai negara demokratis.

“Salah satu buah reformasi adalah jaminan kemerdekaan pers melalui pembentukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini merupakan simbol era reformasi bagi kehidupan

pers, yang semula ada dalam cengkeraman penguasa, dan disambut dengan gegap gempita sebagai era kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan salah satu ciri yang menandai tegaknya demokrasi,” paparnya.

Oleh karena itu, urai Ninik, cita-cita negara untuk menegakkan demokrasi tidak terlepas dari komitmen untuk merawat kemerdekaan pers. Demokrasi akan tegak apabila pers dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan bebas serta terhindar dari campur tangan pihak mana pun. Sebaliknya, merupakan penanda goyahnya demokrasi, apabila pers menjadi terbelenggu, terepresi, dan kehilangan independensi.

Dalam pandangan Ninik, era reformasi merupakan titik balik yang menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dijamin sepenuhnya oleh ne-

gara. Sebelumnya pada era Orde Baru kehidupan pers nyaris penuh represi. Pemberedelan menjadi sarana yang ampuh dalam membungkam hak konstitusional warga negara untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Pers menjadi tidak independen karena posisinya tunduk dan berada di bawah pemerintah.

Menurut ida, era reformasi merupakan simbol kekuatan rakyat yang menghendaki esensi demokrasi mewujud di negara ini. Esensi dari demokrasi dimaksudkan agar negara dapat menjamin hak-hak fundamental warga negaranya, yang dalam sistem selain demokrasi cenderung dikesampingkan.

“Kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang statis. Kemerdekaan pers menghadapi dinamika sekaligus tantangan, baik dari dalam lingkungan pers maupun dari berbagai anasir di luarnya, termasuk perkembangan teknologi digital dan media

Foto bersama usai Deklarasi Kemerdekaan Pers Capres dan Cawapres pada Sabtu (10/2/2024) di Hall Dewan Pers, Jakarta.
(FOTO: DEWAN PERS)



sosial. Kedua teknologi itu memberi ruang yang sangat luas bagi tumbuhnya hoaks, misinformasi, dan disinformasi. Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih informasi,” ujarnya.

Rekam Jejak

Terhadap acara deklarasi kemerdekaan pers ini, Anies Baswedan mengungkapkan penghargaannya pada Dewan Pers. Ia menilai, ini adalah sebuah kesempatan untuk bersama-sama menjaga agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Bila sebuah tempat disebut sebagai demokratis, kata dia, maka pengertian demokrasi menurut David Collier terdapat lebih dari 560 definisi.

Bagi Anies, tiga unsur yang harus ada dalam alam demokrasi. “Pertama, adalah adanya pemilu yang dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan secara reguler. Kedua, adanya ruang untuk ekspresi oposisi. Ketiga adanya kebebasan untuk berbicara untuk mengungkapkan pandangan di dalam sebuah negara,” tuturnya.

Media memiliki peran yang sangat mendasar, kata mantan mendikbud, untuk menjaga supaya ruang tiga hal tadi bisa berjalan dengan baik. Tentang perlunya dukungan sistemik pada pers dan juga upaya melindungi pers dari kekerasan, baik berupa ancaman fisik maupun digital atas alat-alat yang digunakan oleh media, ia sepakat.

“Ketika kami berdiskusi dengan teman-teman media di daerah, mereka merasakan itu jauh lebih banyak dialami daripada yang di Jakarta. Dua hal tadi, tentang ke-



Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu memberikan sambutan dalam kegiatan Kemerdekaan Pers Capres dan Cawapres pada Sabtu (10/2/2024) di Hall Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



Cita-cita negara untuk menegakkan demokrasi tidak terlepas dari komitmen untuk merawat kemerdekaan pers.

Ninik Rahayu
Ketua Dewan Pers

kerasan fisik dan serangan-serangan pada sistem digital, memang masih terjadi,” kata dia.

Mengutip data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Anies memaparkan, di tahun 2023 jumlah kekerasan terhadap pers mengalami peningkatan sebesar 42% dibanding tahun sebelumnya. Ia menambahkan, itu merupakan data yang terlapor. Tentu masih ada data yang tidak sempat dilaporkan.

“Rekam jejak adalah prediktor terbaik atas perilaku masa depan. Bila masa lalunya menekan media maka dia besok juga akan menekan media. Namun bila masa lalunya memberikan ruang kepada media dan bekerja dengan baik dengan media, maka insya-Allah dia kelak akan bekerja dengan baik juga dengan media,” urai mantan rektor Universitas Paramadina itu.

Komitmen atau dokumen apa saja yang disodorkan bisa ditandatangani oleh siapa pun. Akan tetapi, kata Anies, rekam jejak adalah fakta yang tidak bisa diubah dengan pernyataan dan komitmen.



Calon Presiden Ganjar Pranowo hadir secara daring di acara Kemerdekaan Pers Capres dan Cawapres pada Sabtu (10/2/2024) di Hall Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Anies menginformasikan rekam jejaknya selama menjadi gubernur di Jakarta. Apabila ada masalah dengan pers, Anies memilih untuk melaporkan ke Dewan Pers dan bukan ke kepolisian atau ke tempat lain. Ia pun tidak menggunakan metode lain dalam menyelesaikan masalah pers tersebut. Tindakan itu dilakukan dengan dalih agar semua pihak menjunjung tinggi kebebasan pers di Indonesia.

Membangun suatu ekosistem pers yang baik, menurut Anies, maknanya adalah menjaga demokrasi di negara tercinta. “Ini adalah komitmen kami. Kami siap untuk ikut menjaganya dan kami berharap ikhtiar kita untuk membangun demokrasi yang sehat benar-benar bisa terwujud. Itu sebabnya pemilu harus berjalan aman, damai, dan yang penting lagi jujur. Kejujuran akan menghasilkan kredibilitas. Jujur itu pilarnya demokrasi,” ungkapnya.



Pemerintah harus siap membantu insan pers. meskipun kemudian mereka akan mengkritik balik.

Ganjar Pranowo
Capres

Butuh Kritik

Adapun capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo, menyampaikan pandangan, begitu pentingnya suara media untuk bisa mengawal pemilu ini. Tulisan-tulisan yang muncul dia media dinilainya bisa mendukung masyarakat. Ganjar pun mengucapkan terima kasih kepada media yang sudah meliput aktivitasnya selama ini.

“Ketika kita sudah terbiasa untuk dikritik dalam rangka sebuah kontestasi, seperti pilpres, pileg (pilihan legislatif), atau pilkada, maka hal itu akan menjadi biasa. Kalau kita bisa membuka ruang hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, maka di situ terjadi perdebatan dan menghasilkan kesimpulan,” kata dia.

Ia mendiskripsikan, bahwa orang bertinju dalam satu ring ditentukan tempat dan waktu. Setelah selesai dan keluar dari ring, itu artinya laga sudah selesai. Hal itu tidak beda dengan kontestasi politik atau pilpres. Selesai pilpres, maka selesai pula segala ganjalan yang ada dalam hati masing-masing kontestan.

Jika ada sesuatu yang keras di panggung dalam kontestasi politik tersebut, ujarnya, semestinya hal itu tidak dimasukkan ke dalam hati. Mantan gubernur Jawa Tengah itu berprinsip, semakin terbuka maka akan kian baik dan akan bisa mendukung masyarakat.

“Terus terang, ketika saya mendapatkan amanah menjadi gubernur, ya saya terinspirasi apa yang terjadi di Jakarta. Waktu itu gubernur Jakarta, Ali Sadikin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu

dikritik. Langkah selanjutnya justru dia kemudian membangun lembaga bantuan hukum (LBH). Nah Ali Sadikin mendapatkan serangan pertama dari anak yang dilahirkan itu. Inspirasi ini saya coba ketika menjabat di pemerintahan,” ungkapnya.

Ia mengajak masyarakat untuk mendorong pers agar lebih profesional. Salah satu caranya adalah memberikan ruang pelatihan. Menurut Ganjar, pemerintah harus siap membantu insan pers, meskipun kemudian mereka akan mengkritik balik.

“Itulah yang perlu kita berikan. Saya kira wajib hukumnya siapa pun pejabatnya untuk punya komitmen pada kebebasan pers,” ujarnya.

Tokoh pers Bambang Harymurti sependapat dengan pandangan Anies dan Ganjar. Ia juga mendambakan agar pemimpin negeri ini bisa bersikap seperti Ali Sadikan kala menjabat sebagai gubernur Jakarta.

“Saat menjadi jadi gubernur, Ali Sadikin acap datang dan marah-marah ke tempat pers jika tidak ada kritikan di media. Kata Ali Sadikin: kalau tidak ada kritik, berarti kalian tidak bekerja,” tutur Bambang.

Semasa menjadi gubernur, cerita mantan pemimpin redaksi Tempo itu, Ali memposisikan pers dan para aktivis sebagai mitra dalam bekerja mengelola pemerintah Jakarta. Ali bahkan juga membantu dibangunnya kompleks perumahan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), padahal para wartawan sering mengkritiknya.

Siapa pun yang terpilih menjadi presiden, ia berharap bisa meniru



Calon Presiden Anies Baswedan hadir secara langsung di acara Kemerdekaan Pers Capres dan Cawapres pada Sabtu (10/2/2024) di Hall Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



Bila masa lalunya menekan media maka dia besok juga akan menekan media.”

Anies Baswedan
Capres

sikap Ali Sadikin ketika berhubungan dengan pers. Hingga kini, ia merasa belum pernah ketemu lagi pejabat di Indonesia yang seperti itu.

Sedangkan mantan Ketua Dewan Pers, Prof Bagir Manan, menyampaikan terima kasih kepada para calon presiden yang berkomitmen untuk menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan pers. Namun ia mengingatkan, bahwa kemerdekaan harus disertai kesetaraan dan persaudaraan.

“Tanpa kesetaraan, kebebasan bisa menimbulkan eksploitasi antara satu dan yang lain. Kita juga harus menjunjung asas *fraternity* atau persaudaraan. Jika kita harus berlaku sebagai saudara, maka kita akan selalu berperilaku jujur pada diri dan bangsa. Kita akan solidar pada apa yang terjadi di masyarakat,” kata Bagir. **Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers**

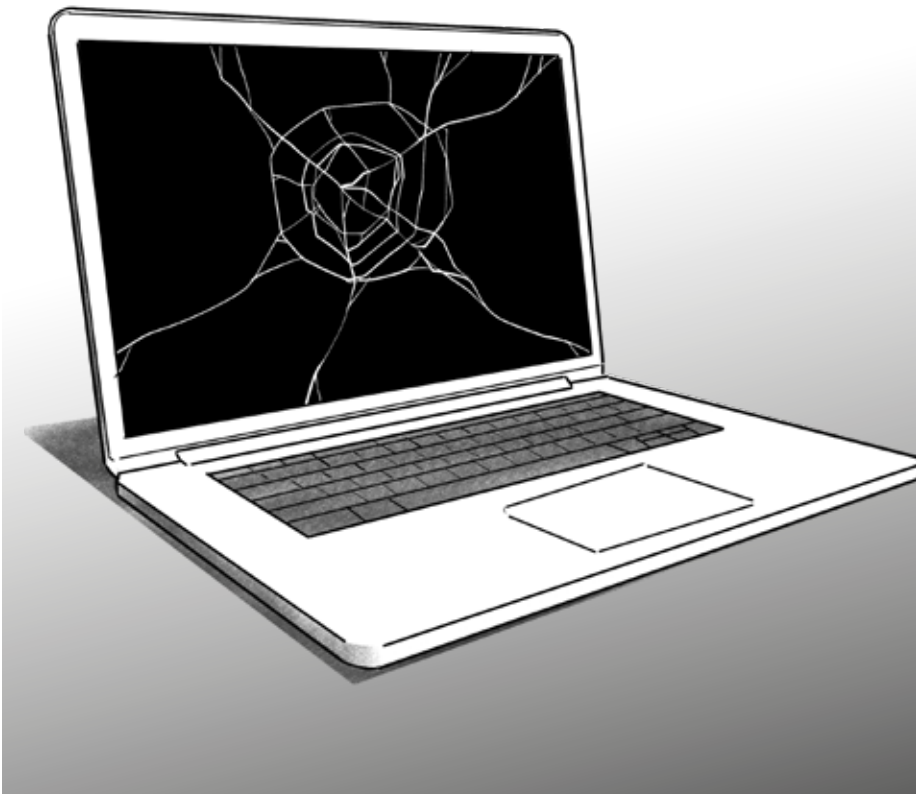
Pers Perlu Dukungan Sistemik

Oleh
Ninik Rahayu *)

Saat ini Indonesia telah memasuki 26 tahun pas-careformasi pada 1998. Reformasi merupakan tonggak bagi negara Indonesia untuk hadir sebagai negara demokratis. Sebagaimana diketahui, salah satu dari buah reformasi adalah jaminan kemerdekaan pers melalui pembentukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang ini merupakan simbol era reformasi bagi kehidupan pers. Bila semula pers berada ada dalam cengkraman penguasa, maka hadirnya UU Pers disambut dengan gegap gempita sebagai era kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan salah satu ciri yang menandai tegaknya demokrasi.





Oleh karena itu, komitmen negara untuk menegakkan demokrasi tidak terlepas dari komitmen untuk merawat kemerdekaan pers. Demokrasi akan tegak apabila pers dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan bebas serta terhindar dari campur tangan pihak mana pun. Sebaliknya, merupakan penanda goyahnya demokrasi, apabila pers menjadi terbelenggu, terepresi, dan kehilangan independensi.

Era reformasi merupakan titik balik yang menegaskan, bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dijamin sepenuhnya oleh negara. Sebelumnya pada era Orde Baru, kehidupan pers nyaris penuh represi. Pemberedelan menjadi sarana yang ampuh untuk membungkam hak konstitusional warga negara untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Pers menjadi tidak independen karena posisinya tunduk dan berada di bawah pemerintah.

Semua sepakat, era reformasi merupakan simbol kekuatan rakyat yang menghendaki esensi demokrasi mewujud di negara ini. Esensi dari demokrasi adalah agar negara dapat menjamin hak-hak fundamental warga negaranya. Hal itu dalam sistem selain demokrasi cenderung dikesampingkan.

Kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang statis. Ia menghadapi dinamika sekaligus tantangan, baik dari dalam lingkungan pers maupun dari berbagai anasir di luarnya. Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberi ruang yang sangat luas bagi tumbuhnya hoaks, misinformasi, dan disinformasi.

Situasi ini menantang pers untuk hadir sebagai penjernih informasi. Di sisi lain, perkembangan platform digital menjadi medium raksasa yang mengambil alih distribusi informasi. Da-



Kami berharap kepemimpinan nasional 2024-2029 memberikan dukungan sistemik untuk turut mendongkrak demokrasi dan menjaga independensi serta kemerdekaan pers.

lam hal ini porsi periklanan diserap oleh platform tanpa disertai *sharing revenue* yang memadai.

Pada sisi lain, UU Pers memang memberikan payung hukum perlindungan bagi pers, namun dukungan atas penegakan UU ini masih belum signifikan. Oleh karena itu, di beberapa tempat masih saja terjadi kekerasan terhadap wartawan, termasuk kekerasan berbasis digital. Tak terkecuali, hal itu juga yang menyasar pada wartawan perempuan.

Kekerasan pada pers juga dapat berupa perusakan alat kerja atau berupa serangan siber terhadap pers berbasis digital yang dalam kenyataannya membuat pers harus menyediakan pelindung sistem digital yang nominalnya sungguh menguras air mata. Selain itu masih ada catatan atas hubungan kerja di dalam lingkungan perusahaan pers yang masih diskriminatif sehingga membuat wartawan kehilangan idealisme.

Berbagai situasi ini menunjukkan, bahwa secara sistemik belum tersedia dukungan yang memadai bagi pers untuk terus menjalankan perannya sebagai media informasi, hiburan, edukasi, dan kontrol sosial. Pers seolah bekerja sendirian tanpa dukungan.

Hal ini bukan berarti, bahwa tidak ada dukungan sama sekali dari institusi negara dan swasta. Dukungan itu ada, namun masih belum sistematis, sebagian sporadis, dan di antaranya terkait dengan kepentingan institusi. Di sisi lain, iklan terkadang ikut memengaruhi independensi pers walaupun secara tidak langsung.

Pada 14 Februari 2024 lalu merupakan waktu saat rakyat Indonesia menggunakan hak konstitusionalnya untuk menentukan pergantian kepemimpinan nasional, sebagaimana telah berlangsung setiap lima tahun sekali pascareformasi. Itulah momentum aktualisasi kedaulatan rakyat dalam menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan legislatif dan eksekutif sebagai pemegang kekuasaan negara yang sah berdasarkan konstitusi.

Para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi dalam pemilu tahun ini, siapa pun yang kelak terpilih, merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan yang akan turut menentukan wajah demokrasi Indonesia ke depan. Oleh karena itu, dukungan setiap pasangan calon untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kemerdekaan pers menjadi penting agar pers tetap mampu menjalankan perannya menjadi pencerah dan penggugah kesadaran publik untuk menjadi bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi.

Kami berharap kepemimpinan nasional 2024-2029 memberikan dukungan sistemik untuk turut mendongkrak demokrasi dan menjaga independensi serta kemerdekaan pers. Berikan dukungan sistemik bagi pers untuk tetap tumbuh dan bekerja dengan independen! Hapuskan kekerasan dan kriminalisasi terhadap pers! Wujudkan negara Indonesia yang demokratis! ●

*) *Ketua Dewan Pers*

Ihwal Jurnalisme Berkualitas



Menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers di Jakarta, 20 Februari 2024, Presiden Joko Widodo mengungkapkan telah ditandatangani Peraturan Presiden

nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Perpres ini mengatur soal kerja sama antara perusahaan pers dengan platform digital.

Setelah menunggu proses pembahasan cukup lama, sekitar tiga tahun, kalangan pers di tanah air kini boleh lega dan berharap, bahwa regulasi tersebut akan membantu keberlangsungan bisnis media mereka. Berdasarkan peraturan ini, kerja sama perusahaan pers dengan perusahaan platform digital diharapkan dapat dilakukan secara adil dan transparan.

Namun, untuk implementasi perpres tersebut tentu masih dibutuhkan banyak persiapan. Sejauh ini, perusahaan platform digital juga belum menyampaikan tanggapannya terhadap terbitnya regulasi ini.

Jurnalisme Berkualitas

Tulisan pendek ini, karenanya, tidak hendak menelisik lebih jauh soal perpres tersebut. Melainkan, ini sekadar akan mengulik satu aspek dari Perpres nomor 32 Tahun 2024 yang cukup menarik.

Meskipun mengatur soal bisnis, khususnya menyangkut kerja sama perusahaan pers dengan platform digital, perpres ini dibentuk untuk tujuan lebih luas dari “sekadar” urusan bisnis perusahaan pers. Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, bahwa semangat perpres adalah untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas.

“Perlu saya mengingatkan semangat awal perpres ini. Kita ingin jurnalisme berkualitas, jurnalisme yang jauh dari konten negatif, jurnalisme yang mendukung untuk kemajuan Indonesia,” ujar Presiden.

Maka, dapat dipahami bahwa Perpres nomor 23 Tahun 2024 ini bertajuk “Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas”. Hal ini dapat dimaknai bahwa kerja sama perusahaan pers dengan penyedia platform digital dilakukan dalam bingkai peningkatan kualitas jurnalisme di Indonesia.

Dalam konteks ini, pasal 5 Perpres 23 Tahun 2024 mengatur kewajiban perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas. Antara lain dengan a) tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Pers; b) memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers; c) memberikan perlakuan

yang adil kepada semua perusahaan pers dalam menawarkan layanan platform digital; d) melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab; e) memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan; dan f) bekerjasama dengan perusahaan pers.

Sinergi Berbagai Pihak

Dalam ekosistem digital, penyedia platform digital memang mempunyai peran strategis untuk mendukung jurnalisme berkualitas, terutama karena otoritasnya dalam membangun dan mengembangkan algoritma bagi proses seleksi dan distribusi informasi, termasuk berita. Penyedia platform digital harus menjamin dan mendukung distribusi informasi dan berita-berita yang memiliki kemanfaatan bagi publik.



Di luar proses seleksi dan distribusi, kualitas berita tentu saja sangat terkait dengan proses produksi. Dalam konteks ini penyedia platform digital diharapkan dukungannya terhadap fasilitasi penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi pekerja pers, baik menyangkut manajemen bisnis usaha pers maupun kompetensi jurnalistik mereka. Dukungan ini dapat dianggap sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan platform digital.



Perlu saya mengingatkan semangat awal perpres ini. Kita ingin jurnalisme berkualitas, jurnalisme yang jauh dari konten negatif, jurnalisme yang mendukung untuk kemajuan Indonesia.”

Presiden Joko Widodo
Presiden RI

Secara umum, peningkatan kualitas jurnalisme tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya pada hanya satu-dua pihak. Akan tetapi, perusahaan pers sebagai produsen adalah pihak yang paling utama bertanggung jawab terhadap kualitas karya-karya jurnalistik yang dihasilkan. Kesalahan dalam pemberitaan, pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik pada konten berita mereka misalnya, tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada pihak-pihak lain.

Media harus memiliki komitmen untuk menghasilkan karya-karya

jurnalistik yang bermutu dengan menerapkan standar kerja profesional secara ketat bagi para jurnalisnya. Di sisi lain perusahaan media wajib memberi penghargaan yang memadai bagi para jurnalisnya, menyediakan fasilitas dan pelatihan-pelatihan agar mereka mampu menjalankan tugas jurnalistik dengan baik.

Faktanya, saat ini tidak banyak perusahaan media yang mampu menerapkan manajemen bisnis dan standar kerja profesional. Selain keterbatasan modal, mereka juga menghadapi minimnya tenaga jurnalis yang kompeten. Sangat lazim di banyak daerah di Indonesia, perusahaan media menggantungkan pendapatan utama mereka pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui kerja sama mereka dengan pemerintah daerah setempat. Ini membuat konten media lebih banyak berupa berita-berita *press release* dari berbagai instansi pemerintah, daripada berita-berita yang mengangkat isu-isu menyangkut kepentingan publik. Fungsi media sebagai lembaga edukatif dan kontrol sosial acap terabaikan.

Dalam kondisi seperti ini regulasi tentang *publisher right* menumbuhkan harapan bagi media untuk memperoleh pendapatan dari sumber lain di luar dana APBD, meskipun praktiknya tidak akan mudah. Berbagai pihak lain, para pemangku kepentingan media, diharapkan peran sertanya bersinergi membangun ekosistem pers yang sehat, agar mampu mendorong perusahaan pers dan jurnalis menjalankan tugas pekerjaannya secara profesional. • (Winarto, *tenaga ahli Dewan Pers*).



▲ Presiden Joko Widodo mengumumkan telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights di acara Puncak Hari Pers Nasional 2024 pada Selasa (20/2/2024) di Ancol, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Perpres Hak Penerbit Ditandatangani, Jokowi: Kita Ingin Kerja Sama Lebih Adil Antara Pers dan Platform Global

JAKARTA—Presiden Joko Widodo memastikan telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres *Publisher Rights* (Hak Penerbit). Menurut presiden, penandatanganan dilakukan kemarin (19/2) di Jakarta.

Sebelum menandatangani perpres itu, presiden mengaku betul-betul mendengarkan aspirasi dari

rekan-rekan pers. Jokowi menyadari, aspirasi insan pers tidak benar-benar bulat. Ada perdebatan panjang dan perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan platform digital, maupun platform digital besar.

“Kita harus timbang terus implikasinya. Setelah mulai ada titik ke pemahaman, kita bisa mulai menemukan titik temu. Ini ditambah dengan desakan dari Dewan Pers serta dorongan dari perwakilan perusahaan

pers maupun asosiasi media,” kata Jokowi dalam acara puncak peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/24).

Semangat awal dari perpres ini, ujarnya, adalah ingin menyudahi semua konten-konten negatif dan melahirkan jurnalisme yang berkualitas untuk kemajuan Indonesia. “Kita juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional. Kita ingin kerja sama yang lebih adil antara perusahaan pers dan platform digital global,” tutur Jokowi.

Pemerintah serius memikirkan bagaimana menghadapi transformasi digital ini. Ia sekaligus juga menepis kekhawatiran para konten kreator. “Kabarnya para konten kreator khawatir terhadap perpres ini. Saya sampaikan, bahwa perpres ini tidak berlaku untuk konten kreator. Silakan dilanjutkan kerja sama yang selama ini sudah berjalan baik dengan platform digital,” paparnya.



Sekarang tidak lagi seperti itu. KBLI untuk perusahaan pers kita perluas. Di samping penerbitan berita, perusahaan pers bisa memiliki bidang usaha lain yang terkait dengan bidang utama usahanya.”

KBLI Media Diperluas

JAKARTA—Dewan Pers memperluas jangkauan bidang usaha media atau perusahaan pers yang mengajukan diri untuk ikut verifikasi. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pendataan, Penelitian, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, A Sapto Anggoro, ketika menjadi pembicara dalam diskusi di sela peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta, Senin (19/2/24).

Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro (berdiri) menjadi pembicara dalam Konvensi Nasional Media Massa 2024 di sesi Unconference dengan tema Strategi Menjaga Kesehatan & Kesenambungan Bisnis Media pada Senin (19/2/2024) di Ancol, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)





Menurut Sapto, selama ini Dewan Pers menetapkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk media haruslah di bidang penerbitan pers saja. Jika ada perusahaan pers yang ikut verifikasi dan memiliki bidang usaha lain, maka hal itu dinyatakan tidak sesuai dengan KBLI sehingga tidak bisa lolos verifikasi.

“Sekarang tidak lagi seperti itu. KBLI untuk perusahaan pers kita perluas. Di samping penerbitan berita, perusahaan pers bisa memiliki bidang usaha lain yang terkait dengan bidang utama usahanya,” ujar Sapto.

Ia memberi contoh, perusahaan pers dimungkinkan memiliki usaha bidang penerbitan buku, pelatihan-pelatihan, dan diskusi publik berbayar. Bahkan, kata Sapto, perusahaan pers bisa saja memiliki bidang usaha sebagai penyelenggara acara atau event organizer bagi perusahaan lain. Namun, Dewan Pers akan menolak

media yang juga memiliki usaha kontraktor, pertambangan, perdagangan, dan sejenisnya. ●

Publisher Rights Segera Disahkan

JAKARTA—Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang *Publisher Rights* akan segera disahkan. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengutarakan hal itu ketika menjadi pembicara kunci dalam Konvensi Nasional Media Massa dalam memperingati Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta, Senin (19/2/24).

“Selanjutnya pemerintah segera mengesahkan (R-perpres) kebijakan yang mendorong level *playing field* di isu digital. R-Perpres *Publisher Rights* berusaha untuk menginisiasi kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital yang dilandasi oleh kejelasan hukum,” tuturnya.

Terdapat tiga poin utama dalam R-Perpres *Publisher Rights*. Pertama untuk mengkodifikasi praktik kerja sama yang sudah ada. Kedua, mendorong interaksi antara platform digital dengan perusahaan pers secara lebih berimbang. Terakhir, memberikan kesempatan perusahaan pers terlepas dari skala usahanya untuk dapat meningkatkan kerja sama dengan platform digital.

Ia menyatakan, pemerintah juga harus melakukan perubahan kedua pada pasal 40A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemerintah memiliki wewenang untuk menghadirkan



Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi saat membuka Konvensi Nasional Media Massa 2024 pada Senin (19/2/2024) di Ancol, Jakarta.

(FOTO: DEWAN PERS)



Selanjutnya pemerintah segera mengesahkan (R-perpres) kebijakan yang mendorong level playing field di isu digital. R-Perpres Publisher Rights berusaha untuk menginisiasi kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital yang dilandasi oleh kejelasan hukum.”

digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif supaya menghadirkan *fair playing field* dalam ekosistem digital nasional. ●

Pers Harus Beradaptasi di Tengah Disrupsi Teknologi

JAKARTA—Dalam menghadapi disrupsi teknologi informasi dan komunikasi, manusia harus bisa beradaptasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menegaskan perlunya media mengelola teknologi informasi dengan baik.

“Kendalikan teknologi tersebut, minimalkan risiko, dan besarkan manfaatnya,” kata Nezar. Ia mengutarakan hal itu pada acara Konvensi Nasional Media Massa di Ancol dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional, Senin (19/2).



Kendalikan teknologi tersebut, minimalkan risiko, dan besarkan manfaatnya.”

Ia menilai, kemunculan *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan di tengah-tengah kemajuan teknologi mendorong sebuah fenomena paradoks. AI mampu mempermudah produksi dan distribusi penyebaran konten, serta berusaha membaca intuisi manusia terhadap fakta yang akan diberitakan.

Di samping itu, ia juga menyebutkan terjadinya pergeseran audiens yang lebih menyenangi konten media sosial dan perlahan menghancurkan pola bisnis media. Hal ini diakibatkan karena adanya pola perubahan komunikasi. ●

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria (berdiri) menjadi pembicara pada Konvensi Nasional Media Massa 2024 dalam sesi kedua dengan tema Pers, Demokrasi Digital, dan AI Beretika pada Senin (19/2/2024) di Ancol, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)





◀ Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu (kiri), Calon Presiden no urut 03, Ganjar Pranowo bersama Calon Presiden 01, Anies Baswedan berfoto bersama usai menandatangani komitmen Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tentang Kemerdekaan Pers pada Sabtu (10/2/2024) di Hall Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Ketua Dewan Pers: Kemerdekaan Pers Wujud Tegaknya Demokrasi

JAKARTA – Kemerdekaan pers merupakan wujud tegaknya demokrasi. Demokrasi akan tegak apabila pers dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan bebas serta terhindar dari campur tangan pihak manapun. Sebaliknya, apabila pers menjadi terbelenggu, terrepresi, dan kehilangan independensi, maka itu merupakan penanda goyahnya demokrasi. Oleh karena itu, komitmen negara untuk menegakkan demokrasi tidak terlepas dari komitmen untuk merawat kemerdekaan pers.



Komitmen negara untuk menegakkan demokrasi tidak terlepas dari komitmen untuk merawat kemerdekaan pers.”

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dalam sambutannya pada acara Deklarasi Kemerdekaan Pers oleh Capres dan Cawapres. Acara ini digelar Sabtu (10/2/2024) malam di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

“Sebagaimana diketahui, salah satu buah reformasi adalah jaminan kemerdekaan pers melalui pembentukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang ini merupakan simbol era reformasi bagi bangsa Indonesia termasuk bagi kehidupan pers, yang semula ada dalam cengkeraman penguasa, lalu disambut dengan gegap gempita sebagai era kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan salah satu ciri yang menandai tegaknya demokrasi,” urai Ninik.

Dia menyebutkan, era reformasi merupakan titik balik yang menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dijamin sepenuhnya oleh negara. Pada era orde baru, kehidupan pers nyaris penuh represi. Pembredelan menjadi sarana yang ampuh untuk membungkam hak konstitusional warga negara oleh penguasa dalam mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Pers menjadi tidak independen karena posisinya berada dan tunduk di bawah pemerintah. ● **Arif Supriyono**



▲ Penyelesaian pengaduan antara Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko dengan Majalah Tempo pada Kamis (11/1/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.
(FOTO: DEWAN PERS)



Laporan Kasus Pengaduan Januari 2024

DESEMBER

Risalah No 1
PT SMN dengan kabartrenggalekcom

Risalah No 2
ASIRI dengan Tribun Network

Risalah No 3
PT Putra Konut Perkasa dengan tintasultracom

SURAT 

12 surat Surat Undangan Mediasi.
14 kasus Arsip

PPR: 1 PPR

terhadap Majalah Tempo atas pengaduan Moch Wijdan

PPR: 2 PPR

terhadap rmol.id & rmolsumsel atas pengaduan PT RMKE

PPR: 3 PPR

terhadap Majalah Tempo atas pengaduan Moeldoko

PPR: 4 PPR

terhadap pelitatodaycom atas pengaduan Amintas

PPR: 5 PPR

terhadap HU Media Bali atas pengaduan Arya Wedakarna



Rapat Penyusunan Rancangan Rencana Strategi Dewan Pers

Dewan Pers menyelenggarakan rapat penyusunan rancangan rencana strategi Dewan Pers 2025-2029 pada Kamis dan Jumat (1-2/2/2024) di Bandung, Jawa Barat.

Rapat tersebut diadakan sehubungan dengan telah masuknya periode akhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan Renstra 2020-2024, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah persiapan untuk menyusun rancangan rencana strategi (Renstra) Dewan Pers 2025-2029.

Dalam rapat tersebut, selain seluruh anggota Dewan Pers serta tenaga ahli Dewan Pers yang hadir, Dewan Pers juga turut mengundang Bappenas serta para praktisi, pengamat media dan akademisi untuk dimintai masukannya dalam rangka penyusunan Renstra baik dari ruang lingkup, timeline, dan gambaran mengenai arah kebijakan nasional ke depan. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Uji Publik Pedoman Perilaku dan Standar Pers Professional

Dewan Pers menggelar uji publik terhadap rancangan peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Perilaku dan Standar Pers Professional pada Senin (5/2/2024) di Depok, Jawa Barat.

Uji publik tersebut dalam rangka untuk meminta masukan dari publik terhadap pedoman tersebut sebelum nantinya akan disahkan menjadi peraturan Dewan Pers.

Acara yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu dengan didampingi oleh anggota Dewan Pers, Asep setiawan tersebut turut mengundang perwakilan dari Konstituen Dewan Pers, pimpinan media, serta perwakilan kementerian/Lembaga. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Menghadiri Undangan PWI Dalam Rangka HPN 2024

Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu menghadiri undangan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangka merayakan Hari Pers Nasional sekaligus HUT ke-78 PWI pada Jumat (9/2/2024) di kantor pusat PWI It 4, Gedung Dewan Dewan Pers, Jakarta.

Hadir dalam acara itu, selain Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Sekjen PWI Sayid Iskandarsyah, wartawan senior, dan undangan lain yakni Karo Penmas Mabas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko; Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, utusan dari Malaysia dan perwakilan dari Astra Pusat. Acara yang berlangsung sederhana namun khidmat tersebut, ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi sebagai ungkapan rasa syukur pada HUT ke-78 PWI. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



Kunjungan dari Media Malaysia

Dewan Pers menerima kunjungan dari media malaysia bernama.com pada Kamis (15/2/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Rombongan dari media Bernama.com tersebut diterima langsung oleh anggota Dewan Pers, Totok Suryanto dan Paulus Tri Agung Kristanto. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



Menerima Kunjungan dari USAID

Dewan Pers menerima kunjungan dari United States Agency for International Development (USAID) pada Kamis (15/2/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh anggota Dewan Pers, Asep Setiawan. •

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)

